



Bahasa Sebagai Alat Dakwah Politik: Studi Kasus Pidato Ulama Dalam Konteks Politik Islam

M. Fahri Harahap¹ Marzuki Manurung²

Program Studi Pemikiran Politik Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara¹⁻²

Email Korespondensi: mhdfahri199905@gmail.com¹ marzuki1100000173@uinsu.ac.id²

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 25 Juli 2025, Article published: 19 Agustus 2025

ABSTRACT

Language in Islamic da'wah plays a strategic role, not only as a medium of spiritual communication but also as an instrument for framing political issues infused with ideological interests. Ulama, as socio-religious actors, employ rhetorical strategies such as emotional diction, repetition, and historical narratives to shape public opinion, provide religious legitimacy, and direct the political behavior of Muslims. This study aims to examine the use of language as a tool of political da'wah in the sermons of ulama containing Islamic political messages. Using a descriptive qualitative approach and Norman Fairclough's critical discourse analysis, data were collected from documented ulama speeches disseminated across digital platforms and analyzed through textual, discursive, and social practice dimensions. The findings reveal that da'wah language functions not only to convey religious teachings but also to serve as an effective political instrument in legitimizing ideologies and mobilizing collective support. Nevertheless, political da'wah presents an ambivalent impact: on the one hand, it strengthens political participation based on religious values, but on the other, it can trigger social polarization.

Keywords: Da'wah Language, Ulama, Islamic Politics, Critical Discourse Analysis

ABSTRAK

Bahasa dalam dakwah Islam memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai media komunikasi spiritual, tetapi juga sebagai instrumen pembingkai isu-isu politik yang sarat dengan kepentingan ideologis. Ulama sebagai aktor sosial-keagamaan memanfaatkan strategi retorika seperti diksi emosional, repetisi, dan narasi historis untuk membentuk opini publik, memberi legitimasi keagamaan, sekaligus mengarahkan perilaku politik umat. Penelitian ini bertujuan mengkaji penggunaan bahasa sebagai alat dakwah politik dalam pidato ulama yang memuat pesan politik Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis wacana kritis model Norman Fairclough, data diperoleh dari dokumentasi pidato ulama yang tersebar di berbagai platform digital, dianalisis melalui dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa dakwah tidak hanya berfungsi menyampaikan ajaran agama, tetapi juga menjadi media legitimasi politik yang efektif dalam membangun dukungan ideologis masyarakat Muslim. Meski demikian, dakwah politik memiliki dampak ambivalen: di satu sisi memperkuat partisipasi politik berbasis nilai agama, namun di sisi lain dapat memicu polarisasi sosial.

Kata Kunci: Bahasa Dakwah, Ulama, Politik Islam, Analisis Wacana Kritis

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan instrumen fundamental dalam kehidupan manusia, tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana membentuk makna sosial, budaya, dan politik. Dalam konteks dakwah Islam, bahasa memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi medium utama penyampaian ajaran agama. Namun, ketika dakwah bersentuhan dengan ranah politik, fungsi bahasa meluas dari sekadar penyampai pesan spiritual menjadi sarana pembentukan opini publik, legitimasi kekuasaan, hingga mobilisasi massa. Studi wacana politik kontemporer menunjukkan bahwa bahasa memiliki kekuatan performatif yang mampu mengonstruksi realitas sosial dan politik (Fairclough, 2013; van Dijk, 2018). Dengan demikian, bahasa tidak dapat dipandang netral, melainkan sebagai instrumen kekuasaan yang sarat dengan kepentingan ideologis.

Sejarah Islam memperlihatkan bahwa keterlibatan ulama dalam politik telah berlangsung sejak masa klasik. Ulama tidak hanya menjadi penjaga otoritas keagamaan, tetapi juga turut memainkan peran penting dalam memberi legitimasi kepada kekuasaan atau bahkan menentang kebijakan politik yang dianggap bertentangan dengan nilai Islam. Pada era kontemporer, pidato ulama sering kali dibingkai dalam narasi keagamaan yang mengandung pesan politik implisit maupun eksplisit. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana bahasa dakwah digunakan sebagai sarana retorika politik yang mampu memengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku politik umat (Eickelman & Piscatori, 2004; Mandaville, 2014). Dengan demikian, analisis terhadap bahasa dakwah politik penting untuk memahami interaksi antara agama dan politik dalam masyarakat Muslim modern.

Fenomena kontemporer memperlihatkan bahwa pidato ulama di forum keagamaan maupun politik tidak jarang memuat nuansa ideologis yang sarat dengan muatan politik. Melalui ceramah, khutbah, maupun orasi publik, isu-isu politik sering dibingkai dengan bahasa moral dan spiritual yang menciptakan legitimasi keagamaan atas tindakan politik tertentu. Strategi linguistik ini memperlihatkan bahwa ulama menggunakan perangkat retorika untuk membangun wacana politik dalam balutan religiusitas. Dalam perspektif analisis wacana, bahasa dakwah semacam ini menjadi medium efektif untuk memperkuat posisi ideologi sekaligus membangun otoritas simbolik (Reisigl & Wodak, 2016). Hal tersebut menjadikan kajian terhadap pilihan diksi, narasi, dan strategi retorika ulama semakin relevan untuk dipelajari.

Dalam politik Islam, posisi ulama sebagai agen dakwah politik memiliki legitimasi teologis sekaligus sosiologis. Secara teologis, Islam tidak memisahkan secara tegas antara agama dan politik; sedangkan secara sosiologis, ulama menempati posisi sosial yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat Muslim. Kehadiran ulama dalam arena politik memberikan bobot moral dan legitimasi keagamaan terhadap berbagai isu publik, baik dalam konteks dukungan maupun oposisi. Oleh karena itu, pidato ulama dapat dipahami sebagai praktik diskursif yang berimplikasi pada pembentukan opini publik dan arah keterlibatan politik masyarakat (Roy, 2017; Hafez, 2019). Hal ini menegaskan bahwa studi dakwah

politik tidak hanya terkait komunikasi agama, tetapi juga terkait relasi kuasa dalam ranah sosial.

Namun demikian, penggunaan bahasa dakwah dalam politik tidak lepas dari ambivalensi. Di satu sisi, bahasa dakwah dapat berfungsi sebagai alat pencerahan, advokasi, dan penguatan kesadaran politik umat berbasis nilai keadilan. Di sisi lain, ia juga berpotensi menjadi instrumen mobilisasi kepentingan kekuasaan yang menimbulkan polarisasi sosial. Riset komunikasi politik Islam kontemporer menunjukkan bahwa wacana keagamaan yang digunakan untuk membingkai isu politik sering kali berkontribusi terhadap penguatan identitas kelompok, namun sekaligus dapat memperlemah kohesi sosial (Cesari, 2018; Lynch, 2019). Oleh karena itu, kajian tentang bahasa dakwah politik menjadi relevan untuk menimbang potensi manfaat dan risiko yang ditimbulkannya terhadap stabilitas sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana bahasa digunakan sebagai alat dakwah politik oleh ulama, dengan fokus pada pidato-pidato yang mengandung muatan politik Islam. Studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kritis mengenai strategi bahasa yang digunakan dalam dakwah politik, sekaligus menilai dampaknya terhadap dinamika kehidupan politik dan keagamaan di masyarakat Muslim kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis wacana kritis untuk mengkaji pidato-pidato ulama yang memuat pesan dakwah politik. Data penelitian diperoleh melalui dokumentasi pidato yang tersebar di media digital, seperti YouTube, media sosial, dan situs resmi lembaga keagamaan, yang dipilih secara purposive dengan kriteria berisi muatan politik Islam, disampaikan oleh ulama berpengaruh, serta relevan dengan konteks politik-keagamaan di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis wacana kritis Norman Fairclough yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu analisis teks, praktik diskursif, dan praktik sosial, sehingga memungkinkan peneliti mengeksplorasi strategi linguistik yang digunakan ulama dalam membangun narasi politik bernuansa dakwah sekaligus memahami relasi antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan penelaahan konteks sosial politik yang melatarbelakangi pidato, sesuai standar penelitian kualitatif untuk menjaga validitas dan reliabilitas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahasa Dakwah sebagai Instrumen Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks politik Islam kontemporer, bahasa dakwah yang digunakan oleh ulama tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga memainkan peran sebagai alat komunikasi politik yang strategis. Melalui ceramah, khutbah, dan orasi keagamaan, ulama tidak sekadar menyampaikan nilai-nilai moral dan ajaran agama, tetapi juga menyisipkan pesan-pesan politik yang diarahkan kepada umat untuk membentuk

sikap dan pilihan politik tertentu. Dalam hal ini, bahasa dakwah bertransformasi menjadi media persuasi politik yang kuat, terutama karena dibalut dalam simbol-simbol religius yang akrab dan dipercaya oleh masyarakat Muslim.

Salah satu strategi utama yang digunakan adalah konstruksi wacana melalui istilah-istilah religius yang sarat makna politis. Kata-kata seperti *jihād*, *amar ma'ruf nahi munkar*, *pemimpin zalim*, *umat tertindas*, dan *kemenangan Islam* kerap digunakan untuk membingkai isu-isu politik kontemporer, baik yang berskala lokal maupun nasional. Penggunaan istilah ini tidak hanya memiliki fungsi retorik, tetapi juga memunculkan makna ideologis yang mengarahkan pendengar kepada sikap tertentu terhadap kekuasaan, sistem pemerintahan, maupun tokoh politik yang sedang berkuasa (Farouk et al., 2024).

Bentuk penyampaian pesan politik dalam dakwah ulama pun bervariasi. Ada yang menyampaikannya secara eksplisit, seperti dukungan langsung terhadap calon pemimpin tertentu, seruan untuk menolak sistem sekuler, atau kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Namun, banyak juga ulama yang menyampaikannya secara implisit, melalui narasi tentang pentingnya memilih pemimpin yang beriman, adil, dan pro umat. Meskipun tidak menyebut nama, arah politik dari pesan yang disampaikan sering kali jelas terbaca oleh jamaah yang sudah familiar dengan konteks politik yang sedang berlangsung.

Menariknya, pesan-pesan politik yang disampaikan dalam bentuk dakwah cenderung diterima dengan baik oleh masyarakat karena dibungkus dengan bahasa keagamaan yang menenangkan, menggugah emosi spiritual, dan didasarkan pada dalil-dalil keagamaan. Hal ini menjadikan ulama memiliki otoritas ganda: sebagai penjaga nilai-nilai agama dan sekaligus sebagai pengarah moral-politik umat. Dalam kondisi seperti ini, bahasa dakwah berfungsi sebagai medium legitimasi atas tindakan atau pilihan politik tertentu, yang sering kali sulit dibantah karena dianggap sejalan dengan nilai-nilai agama (Suhada et al., 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa bahasa dakwah telah beralih fungsi menjadi alat produksi dan distribusi wacana politik yang kuat dalam masyarakat Muslim. Dengan menjadikan dakwah sebagai saluran penyampaian pesan politik, ulama tidak hanya membentuk orientasi keagamaan umat, tetapi juga secara aktif mempengaruhi dinamika politik di level sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, peran bahasa dalam dakwah tidak bisa lagi dipahami secara sempit sebagai media spiritual semata, melainkan juga sebagai alat perjuangan ideologis dan politis dalam masyarakat.

Strategi Retorika dan Pilihan Diksi Ulama

Analisis terhadap pidato-pidato ulama dalam konteks dakwah politik memperlihatkan penggunaan strategi retorika yang sangat efektif dalam membangun pengaruh ideologis kepada audiens. Ulama tidak hanya menyampaikan pesan secara informatif, tetapi juga menggunakan gaya bahasa yang menggugah, persuasif, dan penuh muatan emosional. Diksi yang dipilih

bukanlah sekadar kata-kata biasa, melainkan memiliki kekuatan simbolik dan historis yang melekat erat dengan kesadaran kolektif umat Islam.

Salah satu strategi utama yang digunakan adalah penggunaan diksi emosional. Ulama sering memilih kata-kata yang menyentuh sisi spiritual dan perasaan jamaah, seperti *kezaliman*, *kebangkitan umat*, *pengkhianatan terhadap Islam*, *pemimpin munafik*, atau *pejuang kebenaran*. Kata-kata ini tidak hanya membangkitkan semangat, tetapi juga menciptakan suasana krisis atau urgensi moral yang menuntut sikap dan tindakan. Diksi semacam ini biasanya digunakan untuk memperkuat argumen dalam menyampaikan kritik terhadap sistem politik, tokoh tertentu, atau kebijakan pemerintah, sekaligus membangun citra diri sebagai pembela kebenaran dan suara umat (Muyassaroh et al., 2024).

Selain itu, ulama juga banyak menggunakan repetisi atau pengulangan kalimat kunci dalam pidatonya. Repetisi ini berfungsi untuk mempertegas pesan dan menanamkannya secara mendalam dalam pikiran audiens. Kalimat-kalimat seperti “Kita butuh pemimpin yang takut kepada Allah”, atau “Islam tidak akan bangkit tanpa persatuan umat” sering diulang dalam satu pidato dengan intonasi yang meningkat. Pola pengulangan ini menciptakan efek retorik yang kuat, memperkuat emosi kolektif, dan membangun solidaritas di antara pendengar.

Strategi lain yang menonjol adalah penggunaan narasi historis Islam, yakni dengan merujuk pada kisah-kisah Nabi Muhammad, para sahabat, Khulafaur Rasyidin, maupun tokoh-tokoh perjuangan Islam masa lampau. Narasi ini digunakan untuk membangun analogi antara kondisi umat saat ini dengan situasi sejarah masa lalu, yang kemudian dijadikan pembenaran untuk sikap atau tindakan politik tertentu. Misalnya, pemimpin yang menindas rakyat sering dibandingkan dengan Firaun, sementara tokoh oposisi yang religius disandingkan dengan Musa atau Umar bin Khattab. Teknik ini memberi kekuatan moral dan legitimasi spiritual terhadap pesan politik yang disampaikan (Rahmawati & Muhid, 2021).

Melalui ketiga strategi tersebut diksi emosional, repetisi, dan narasi historis ulama mampu membingkai pesan politik mereka dalam bentuk dakwah yang tidak terasa sebagai propaganda, tetapi sebagai kewajiban moral dan spiritual. Pendengar tidak hanya menerima informasi, tetapi turut terbentuk secara afektif dan ideologis. Dengan demikian, bahasa dalam dakwah politik bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat mobilisasi dan pembentukan kesadaran kolektif.

Legitimasi Keagamaan dalam Wacana Politik

Pidato-pidato ulama yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan adanya pola konsisten dalam memberikan legitimasi keagamaan terhadap isu-isu dan aktor politik tertentu. Dalam konteks ini, ulama memosisikan dirinya sebagai representasi moralitas Islam, sehingga setiap pandangan dan seruannya terhadap suatu peristiwa politik tidak hanya bersifat opini pribadi, tetapi dibingkai sebagai bagian dari ajaran agama. Strategi ini memberi kekuatan simbolik yang besar terhadap pesan politik yang disampaikan, sebab umat cenderung menerima

wacana keagamaan sebagai sesuatu yang otoritatif, bahkan mutlak (Maknun et al., 2024).

Legitimasi keagamaan dalam wacana politik umumnya dibentuk melalui dua cara utama. Pertama, pembingkaihan religius terhadap aktor politik. Ulama kerap menggunakan kriteria keimanan, ketakwaan, dan keadilan sebagai landasan menilai tokoh atau pemimpin politik. Seorang calon pemimpin yang didukung akan digambarkan sebagai sosok *amanah, jujur, pro terhadap umat*, dan *berpihak pada syariat*, bahkan kadang disebut sebagai *pemimpin pilihan Allah* atau *penolong agama*. Sebaliknya, aktor politik yang tidak didukung akan dikonstruksi sebagai *pemimpin zalim, sekuler*, atau *musuh Islam*. Pembingkaihan ini membuat dukungan atau penolakan terhadap seseorang menjadi lebih dari sekadar pilihan politik ia menjadi bagian dari tanggung jawab keagamaan.

Kedua, legitimasi dibentuk melalui penggunaan dalil-dalil agama, baik ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, maupun pendapat ulama klasik, untuk memperkuat posisi politik tertentu. Misalnya, ketika ulama menyerukan penolakan terhadap undang-undang atau kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam, mereka mengutip ayat-ayat tentang keadilan, larangan berbuat zalim, atau pentingnya menegakkan syariat. Hal ini memperkuat narasi bahwa sikap politik yang diambil bukan berdasarkan kepentingan duniawi, tetapi sebagai bagian dari kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Dalam pidato yang bernuansa dakwah politik, kutipan dalil menjadi semacam "stempel kebenaran" atas posisi politik tertentu (Setiawan et al., 2025).

Fenomena ini menunjukkan bahwa pidato dakwah tidak hanya mengandung dimensi religius dan retorika, tetapi juga politis dan ideologis. Ketika pesan politik dibungkus dengan otoritas keagamaan, ia menjadi lebih sulit ditolak oleh publik Muslim yang taat, karena bersinggungan dengan nilai-nilai sakral. Ulama yang berhasil mengonstruksi legitimasi keagamaan dalam pidatonya dapat mempengaruhi sikap politik umat secara luas, bahkan menentukan arah dukungan massa dalam momen-momen penting seperti pemilu, demonstrasi, atau penolakan terhadap kebijakan pemerintah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa legitimasi keagamaan dalam wacana politik bukan hanya instrumen retorika, tetapi juga alat kekuasaan yang efektif. Bahasa dakwah digunakan untuk memberi bobot moral pada posisi politik tertentu, menjadikannya tampak bukan sekadar pilihan strategis, tetapi bagian dari jalan kebenaran dan perjuangan Islam.

Dampak Wacana Dakwah Politik terhadap Opini Publik

Pidato-pidato ulama yang memuat pesan dakwah politik ternyata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan opini publik, khususnya di kalangan masyarakat Muslim yang secara kultural dan emosional dekat dengan tokoh agama. Bahasa yang digunakan dalam dakwah politik tidak hanya bersifat informatif atau ajakan moral, tetapi juga berfungsi sebagai alat pembentukan persepsi sosial dan sikap politik. Penelitian ini menemukan bahwa wacana keagamaan yang disampaikan ulama melalui ceramah dan khutbah politik dapat

membentuk, mengarahkan, bahkan memecah opini masyarakat terhadap isu-isu politik yang sedang berkembang (Syiddik & Hsb, 2025).

Respons publik terhadap wacana dakwah politik sangat bervariasi tergantung pada latar belakang pendidikan, kecenderungan ideologis, dan tingkat kepercayaan terhadap ulama yang bersangkutan. Bagi sebagian kelompok masyarakat, terutama yang memiliki orientasi keagamaan yang kuat, pidato ulama menjadi rujukan utama dalam menentukan sikap politik. Mereka memaknai ajakan ulama bukan sekadar opini pribadi, tetapi sebagai bagian dari kewajiban agama. Dalam konteks ini, pesan dakwah politik diterima sebagai kebenaran normatif yang mengikat secara moral dan spiritual. Hal ini tampak dalam perilaku politik masyarakat, misalnya dalam bentuk dukungan terhadap calon tertentu, partisipasi dalam aksi demonstrasi, atau penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Namun di sisi lain, dakwah politik juga memunculkan efek polarisasi sosial. Ketika ulama menyampaikan pesan politik yang cenderung partisan atau mengandung dikotomi moral misalnya membagi masyarakat ke dalam kelompok “yang berjuang di jalan Allah” versus “yang mendukung kebatilan” hal ini dapat menimbulkan ketegangan horizontal di masyarakat. Masyarakat yang berbeda pandangan politik menjadi saling curiga, bahkan saling menyalahkan atas dasar pembingkai moral dan agama. Dalam beberapa kasus, perbedaan pilihan politik yang sebelumnya bersifat wajar berubah menjadi konflik ideologis yang tajam karena adanya unsur sakralisasi terhadap sikap politik tertentu (Bulqiyah & Fikroh, 2024).

Lebih jauh lagi, penggunaan bahasa dakwah sebagai alat mobilisasi politik juga memperkuat keterikatan emosional antara masyarakat dan figur ulama. Dalam situasi tertentu, hal ini berpotensi memperlemah rasionalitas politik masyarakat, karena sikap dan pilihan mereka lebih didasarkan pada loyalitas religius daripada pertimbangan program, visi, atau kapabilitas politik dari tokoh yang didukung. Ketika figur ulama mengarahkan pilihan politik secara eksplisit, masyarakat yang tunduk secara spiritual cenderung mengikuti tanpa mempertanyakan substansi politik yang diusung.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wacana dakwah politik memiliki dampak ambivalen terhadap opini publik. Di satu sisi, ia dapat menggerakkan kesadaran politik masyarakat berbasis nilai keagamaan. Namun di sisi lain, ia juga dapat menciptakan polarisasi sosial dan mengaburkan batas antara pertimbangan moral dan kepentingan politik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan para pemuka agama untuk menggunakan bahasa dakwah secara bijak agar tidak menimbulkan disintegrasi sosial di tengah pluralitas politik umat.

SIMPULAN

Kesimpulan, bahasa dalam dakwah politik memiliki peran strategis sebagai instrumen pembingkai isu politik dalam nuansa keagamaan, di mana ulama memanfaatkan strategi retorika seperti diksi emosional, repetisi, dan narasi historis untuk membentuk opini publik sekaligus memperkuat legitimasi terhadap aktor

maupun agenda politik tertentu. Pidato keagamaan yang sarat makna politik tidak hanya berfungsi menggerakkan kesadaran kolektif umat, tetapi juga efektif memobilisasi dukungan ideologis dalam konteks sosial-politik yang lebih luas. Meski demikian, penggunaan bahasa dakwah dalam ruang politik menyimpan ambivalensi, karena di satu sisi dapat memperkuat partisipasi politik berbasis nilai agama, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan polarisasi sosial dan mengaburkan batas antara ajaran agama dan kepentingan kekuasaan. Oleh sebab itu, dakwah politik harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian agar tetap menjunjung tinggi nilai persatuan serta tidak disalahgunakan sebagai alat kepentingan sesaat yang dapat mereduksi substansi ajaran Islam itu sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Bulqiyah, H., & Fikroh, S. (2024). Politisasi agama di pemilihan presiden 2024 (Studi kasus korpus bahasa dan politik di Provinsi Jawa Barat, Indonesia). *Jurnal Ilmiah*, 25(1), 89–97.
- Cesari, J. (2018). *What is political Islam?*. Routledge.
- Eickelman, D. F., & Piscatori, J. (2004). *Muslim politics* (2nd ed.). Princeton University Press.
- Fairclough, N. (2013). *Critical discourse analysis: The critical study of language* (2nd ed.). Routledge.
- Farouk, A., Zaid, B., & Lutfyah, S. (2024). Analysis of the role of ulama in public policy from a siyasah syar'iyah perspective. *SYARIAT: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah*, 1(3), 140–147. <https://doi.org/10.35335/6zeytb24>
- Hafez, K. (2019). *The myth of media globalization*. Polity Press.
- Hasanah, U., Holilah, I., Milah, A. S., & Halimatusa'diah. (2025). The transformation of Tablighi Jamaat's da'wah: Digital adaptation and political engagement in Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Studies*, 19(1), 235–266. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v19i1.45960>
- Kurniawan, D. (2025). Da'wah about politics carried out by Islamic groups in the cyber Islamic environment. *Jurnal Dakwah Digital*, 11(1), 1–9.
- Lynch, M. (2019). *The new Arab wars: Uprisings and anarchy in the Middle East*. PublicAffairs.
- Mandaville, P. (2014). *Islam and politics* (2nd ed.). Routledge.
- Maknun, M. L., Iswanto, A., Hidayat, R. A., Hasfi, N., & Islahuddin, I. (2024). Countering radicalism: Text analysis on online da'wah in Indonesia. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 44(1), 27–52. <https://doi.org/10.21580/jid.v44.1.20227>

-
- Muyassaroh, I. S., Harto, U. S., Suparto, D., Permadi, D., & Sutjiatmi, S. (2024). Model komunikasi pendakwah pada konten dakwah dalam isu sosial dan politik di media sosial. *Jurnal Komunikasi Sosial*, 9(4).
- Rahmawati, B., & Muhid, A. (2021). Analisis wacana kritis di media sosial (Studi pada fenomena pro-kontra penolakan dakwah Ustadz Abdul Somad). *Jurnal Dakwah Tabligh*, 20(1), 126–140. <https://doi.org/10.24252/jdt.v20i1.9608>
- Reisigl, M., & Wodak, R. (2016). The discourse-historical approach (DHA). In R. Wodak & M. Meyer (Eds.), *Methods of critical discourse studies* (3rd ed., pp. 23–61). SAGE.
- Roy, O. (2017). *Jihad and death: The global appeal of Islamic State*. Oxford University Press.
- Setiawan, M., Mulkhan, A. M., & Sari, Z. (2025). Analisis wacana korelasi diksi Ahmad Hassan dan Ahmad Dahlan perspektif dakwah di Indonesia. *Jurnal Dakwah Indonesia*, 15(1), 210–215.
- Suhada, D. N., Hidayati, R., & Kusdiane, S. D. (2024). Wacana dan kuasa retorika linguistik-politik agama dalam gerakan sosial Indonesia. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 2182–2190.
- Syiddik, R., & Hsb, Z. E. (2025). Legitimasi ulama dalam konteks politik (Studi kasus: Padang Lawas Utara). *Jurnal Politik Islam*, 2(1), 45–55.
- van Dijk, T. A. (2018). *Discourse and power*. Palgrave Macmillan.
- Wadi, H., Diniaty, L., & Fahrurrazi, F. (2021). Political communication of ulama on social media: Discourse analysis of Ustadz Abdul Somad lecture on YouTube in the 2019 Presidential Election. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, 2(1), 18–23. <https://doi.org/10.30984/kijms.v2i1.15>